

## KAJIAN PERSEPSI NELAYAN TERHADAP KEBIJAKAN PERIKANAN DI KOTA BENGKULU

### *THE FISHERMAN PERCEPTION STUDY ON FISHERY POLICY IN BENGKULU CITY*

**Fina Sulistiya Ningsih**✉, **Irnad**, dan **Indra Cahyadinata**  
*Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu*  
**Email:Finasulistiya@ymail.com**

#### ABSTRACT

*Perception is the ability of a person to organize an observation, was one may have different perceptions even with the same object. In this research will analyze how the perception of fisherman society toward fishery policy in Bengkulu city. The study was conducted in Bengkulu City, namely Pasar Bengkulu, Pondok Besi and Malabro. The number of samples in this study were 114 respondents. Data analysis using linkert scale with 5 criteria. The result shows that the perception of fishermen community on the provision of aid in the form of fish catching infrastructure is 14.91% stated very good, 42.98% good, 25.44% good enough, 8.77% not good and 7.89% very bad. The perception of fishermen community on the provision of aid in the form of fish catching processing facilities as much as 6.14% is very good, 27.19% good, 39.47% good enough, 20.18% is not good and 7.02% is not very good and the last perception of fishermen community on the training and Marketing of fish catch shows that 20.18% states very good, 18.42% good, 26.32% good enough, 27.93% is not good and 13.15% is not very good. If the overall conclusion of average fisherman's perception on policy is 13.73% fisherman society is very perceived Good, 29.53% good perception, 30.41% good enough, 16.96% is not good and 9.35% fisherman society perceived is not very good. It can be concluded that most people perceive to agree on fishery policy in Bengkulu City.*

**Keywords:** *Perception, Policy, Fisherman*

#### PENDAHULUAN

Penanganan masalah pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Didalamnya telah diatur asas-asas yang digunakan sebagai landasan semua warga masyarakat maupun pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Sebagian besar tujuan dari asas-asas tersebut ialah untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat perikanan pada khususnya. Seperti isi dari asas kebersamaan yang terdapat pada Bab 3 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penegelolaan perikanan harus mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan. Asas kebersamaan ini merupakan asas

yang digunakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dengan melibatkan pemerintah maupun swasta (Satria, 2012).

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pada dasarnya dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang perikanan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil dimana kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kinerja ekonomi nelayan serta kinerja industri perikanan. Dimana Eksistensi UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data (Kementerian Koperasi & UKM, 2016), jumlah UKM tercatat 42,39 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha yang ada serta potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja (Nasarudin, 2013). Sangat diharapkan banyaknya jenis dan jumlah UKM termasuk usaha industri pengolahan ikan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir saja, tetapi juga dapat menguatkan perekonomian nasional (Grahardiyarini, 2008 dalam Lestari dan Wirjodirjo, 2010). Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat nelayan terhadap kebijakan dibidang perikanan yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu apakah berpengaruh terhadap kinerja mereka atau tidak.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Penentuan Lokasi dan Sampel

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di kota Bengkulu pada 3 kelurahan sentara nelayan yaitu Kelurahan Pasar Bengkulu, Kelurahan Pondok Besi dan Kelurahan Malabro. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan *proportionate random sampling*. Dimana jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 114 sampel dari jumlah populasi sebanyak 626 nelayan. Jumlah sampel untuk masing-masing kelurahan yaitu: Kelurahan Pasar Bengkulu 36 sampel, Kelurahan Pondok Besi 23 sampel dan Kelurahan Malabro 55 sampel.

### Skala Pengukuran

Kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan metode skala *likert* dengan jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, dimana menurut Risnita (2012), metode Skala *Likert* umumnya digunakan untuk mengukur sikap melalui pernyataan-pernyataan sikap (*attitude statements*)

yaitu rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu mengenai objek sikap yang hendak diungkap. Pemberian bobot skor dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Baik (SB) dengan bobot skor 5
- b. Baik (B) dengan bobot skor 4
- c. Cukup Baik (CB) dengan bobot skor 3
- d. Tidak Baik (TB) dengan bobot skor 2
- e. Sangat Tidak Baik (STB) dengan bobot skor 1

### Uji Validasi dan Reliabilitas

Dalam suatu penelitian, data mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Valid atau tidaknya data sangat menentukan bermutu atau tidaknya data tersebut. Hal ini tergantung instrumen yang digunakan, yakni memenuhi asas validitas dan reliabilitas. Uji instrument penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas (Riskawati, 2013):

#### Uji validitas

Tingkat validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus korelasi product momen, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana adalah  $r_{xy}$  adalah koefisien korelasi,  $n$  adalah jumlah subyek yang diteliti,  $\sum X$  adalah jumlah  $X$  (skor item),  $\sum Y$  adalah jumlah  $Y$  (skor total),  $X^2$  adalah jumlah kuadrat  $X$ ,  $Y^2$  adalah jumlah kuadrat  $Y$ ,  $\sum XY$  adalah jumlah kuadrat antara  $X$ .

Nilai korelasi yang didapat dari rumus tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai di tabel koefisien korelasi  $r$ . Butir disebut valid jika nilai korelasi lebih besar dari nilai di tabel atau ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel) pada taraf signfiikansi 5%.

#### Uji Reabilittas

Pengujian reliabilitas pada kuesioner yang memiliki dua atau lebih pilihan jawaban (skor 1-5) adalah dengan menggunakan rumus Cronbach's Alpha, yaitu:

$$r_{11} = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum \alpha_b^2}{\alpha_1^2} \right\}$$

keterangan adalah  $r_{11}$  adalah Koefisien reliabilitas,  $k$  adalah banyaknya item dan tes.  $\alpha_b^2$  Varians skor tes, dan  $\alpha_1^2$  adalah Varian total

Nilai batas yang digunakan untuk menilai atau untuk menguji apakah setiap variabel dapat dipercaya, handal, dan akurat dipergunakan formula Koefisien Alpha dari Cronbach. Variabel dapat dinyatakan reliabel apabila Koefisien Alpha Cronbach  $> 0,60$ , artinya tingkat reliabilitas sebesar 0,60 merupakan indikasi reliabelnya sebuah konstruk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, responden utama dalam penelitian ini adalah nelayan tangkap yang bersetatus sebagai pemilik kapal yang memberikan informasi tentang usaha penangkapan ikan, persepsi mereka terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu. Karakteristik nelayan yang diamati dalam penelitian ini meliputi: umur, pendidikan formal, pengalaman dan jumlah anggota keluarga.

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

| No.          | Karakteristik                   | Presentase (%) | Rata-rata |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 1.           | Umur (Tahun)                    |                |           |
|              | 20-30                           | 11.1           |           |
|              | 31-40                           | 15.3           |           |
|              | 41-50                           | 23.6           | <b>46</b> |
|              | 51-60                           | 20.1           |           |
| 61-70        | 9.0                             |                |           |
| 2.           | Tingkat Pendidikan              |                |           |
|              | SD                              | 57.9           |           |
|              | SMP/sedrajad                    | 24.5           |           |
| SMA/sedrajad | 17.5                            |                |           |
| 3.           | Jumlah Anggota Keluarga (Orang) |                |           |
|              | >3                              | 19.3           |           |
|              | 4-7                             | 66.7           | <b>5</b>  |
| >7           | 14.0                            |                |           |
| 4.           | Pengalaman Melaut (Tahun)       |                |           |
|              | 2-10                            | 17             |           |
|              | 11-20                           | 24             |           |
|              | 21-30                           | 30             | <b>25</b> |
|              | 31-40                           | 23             |           |
| 41-50        | 6                               |                |           |

*Sumber: Data Primer, diolah 2017*

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas mereka. Biasanya umur yang muda dan sehat lebih memiliki kemampuan fisik yang kuat dibanding dengan umur yang lebih tua.

Pada saat seseorang berusia lanjut, terdapat satu alasan untuk tetap meneruskan pekerjaannya atau tidak, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pekerja yang lebih muda cenderung rendah pengalaman kerjanya jika dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua, ataupun disebabkan karena faktor lain seperti pekerja yang lebih tua lebih stabil, lebih matang, mempunyai pandangan yang lebih seimbang terhadap kehidupan sehingga tidak mudah mengalami tekanan mental atau ketidakberdayaan dalam pekerjaan. Tohir (1993) menyatakan bahwa angkatan kerja digolongkan menjadi usia produktif 18 sampai 50 tahun. Berarti seseorang yang memiliki umur diatas 50 tahun merupakan usia tidak produktif. Berdasarkan Gambar 1, maka dapat dilihat bahwa nelayan yang memiliki presentase umur paling tinggi yaitu pada kisaran usia 41-50 tahun dengan presentase 23,6 %. Dimana hal tersebut tergolong dalam usia produktif seseorang dalam melakukan aktifitas kerjanya. Selain pada kisaran umur 41- 50 tahun, terdapat juga nelayan yang termasuk dalam usia produktif yang berada pada kisaran umur 31-40 tahun sebesar 15.3% dan pada umur 20-30 tahun sebesar 11.1%. Pada saat inilah nelayan sedang berada pada puncak dalam melakukan aktivitasnya. Sehingga para nelayan di Kota Bengkulu termasuk dalam usia produktif.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah nelayan paling banyak memiliki tingkat pendidikan SD dengan presentase sebesar 54.4%. Kemudian disusul dengan nelayan yang memiliki tingkat pendidikan SMP/Segerajat sebesar 24.5%, SMA/Sederajat sebesar 17.5% serta paling kecil yaitu nelayan yang memiliki tingkat pendidikan tidak tamat SD dengan presentase 3.5%. Walaupun Jumlah nelayan yang memiliki tingkat pendidikan yang tidak tamat SD hanya 3.5% namun lebih dari 50% nelayan yang hanya memiliki tingkat pendidikan SD. Nelayan paling banyak memiliki jumlah anggota keluarga 4-6 orang dengan presentase sebesar 66.7%. Kemudian sebanyak 19.3% nelayan memiliki anggota keluarga 3 atau <3 serta 14.0% nelayan memiliki jumlah anggota keluarga <7. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di masyarakat nelayan masih cukup tinggi. Hal ini juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan budaya yang dimiliki nelayan, dimana kebanyakan nelayan beranggapan bahwa banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki.

Berdasarkan gambar 5.3 diatas maka dapat dilihat bahwa nelayan di Kota Bengkulu paling banyak memiliki pengalaman menjadi nelayan selama 21-30 tahun sebesar 30%. Sedangkan nelayan yang memiliki pengalaman paling lama yaitu 41-50 tahun hanya sebesar 6% saja. Hal ini dikarenakan umur yang dimiliki nelayan kota Bengkulu rata-rata adalah 46 tahun sehingga pengalaman yang dimiliki oleh nelayan berkisar pada 21-30 tahun, sebab kebanyakan nelayan memulai usaha penangkapan ikan pada usia remaja.

### **Uji Instrumen Penelitian**

Uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur kevalidan aitem pertanyaan dalam kuisioner

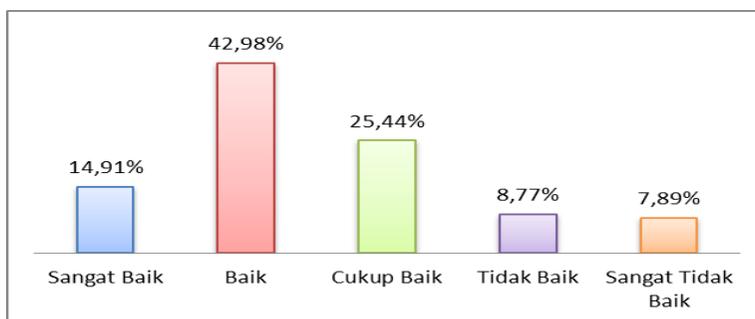
sebelum melakukan wawancara atau pengambilan data kepada responden. Untuk aitem kebijakan, semua butir pertanyaan memiliki kriteria yang valid sebab nilai r-tabel lebih besar dari nilai r-hitung. Dimana nilai r-tabel yang digunakan adalah sebesar 0,444 dengan kriteria jumlah sampel sebanyak 20 dengan signifikansi 5%. Dalam uji validitas ini semua nilai r-hitung lebih besar dari 0,444 sehingga semua butir pertanyaan untuk aitem kebijakan adalah valid. Uji reliabilitas pada penelitian ini diperoleh bahwa semua aitem penelitian memiliki kriteria yang valid, sebab nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0.60.

### Analisis Kebijakan Perikanan

Kebijakan didalam bidang perikanan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Kebijakan yang dianalisis diantaranya adalah kebijakan tentang adanya pemberian bantuan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, pemberian bantuan prasarana pengolahan industri perikanan (usaha ikan kering) serta kebijakan dalam bentuk pelatihan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Analisis kebijakan ini akan dianalisis berdasarkan persepsi masyarakat nelayan yang menjadi responden dalam penelitian terhadap kebijakan yang ada.

#### *Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pemberian Bantuan Prasarana Penangkapan Ikan*

Pemberian bantuan alat-alat penangkapan ikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan *Global Positioning System (Fish Finder)*, jaring, mesin kapal, kapal fiber, coolbox, freezer dan Styrofoam yang diberikan kepada masyarakat nelayan tangkap. Rata-rata persepsi masyarakat terhadap adanya kebijakan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Sumber: Data primer diolah, 2017

**Gambar 1.**

#### **Persentase persepsi masyarakat terhadap pemberian bantuan alat penangkapan ikan**

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat yaitu sebesar 42.98% berpersepsi baik terhadap kebijakan yang ada, mereka

menilai bahwa pemberian bantuan alat-alat penangkapan ikan tersebut akan meningkatkan produktifitas usaha penangkapan ikan yang mereka lakukan. Sebagian nelayan yang berpendapat setuju menyebutkan bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut nelayan akan lebih mudah dalam menyediakan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan, biaya investasi yang dikeluarkan oleh nelayan akan lebih kecil dengan adanya kebijakan tersebut. Alat-alat yang diberikan juga akan mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh saat melaut, contohnya saja dengan adanya bantuan alat tangkap jaring, mereka mengatakan bahwa jika semakin banyak jaring yang digunakan untuk melaut maka hasil tangkapan ikanpun akan semakin banyak. Jika kebijakan tersebut dilakukan maka nelayan akan memiliki jaring dengan jumlah yang lebih banyak sebelum adanya kebijakan tersebut. Kemudian dengan adanya bantuan GPS nelayan akan mengetahui daerah-daerah yang memiliki potensi ikan yang melimpah sehingga hasil tangkapanpun akan bertambah. Begitu juga dengan adanya kebijakan bantuan kapal maupun mesin kapal, tentunya akan menambah produktifitas nelayan sebab semakin besar ukuran kapal ataupun mesin kapal maka akan semakin jauh jarak melaut yang dapat ditempuh oleh nelayan. Selebihnya masyarakat nelayan juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan pemberian coolbox ataupun sejenisnya juga dapat meningkatkan pendapatan nelayan, sebab akan menghambat kerusakan ikan sehingga ikan yang dijual akan semakin banyak jumlahnya.

Selain persepsi masyarakat yang baik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat juga nelayan yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak baik bahkan sangat tidak baik, mereka tidak setuju jika kebijakan-kebijakan tersebut dikatakan akan meningkatkan produktifitas mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Sebesar 8.77% masyarakat mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak baik dan 7.89% sangat tidak baik. Masyarakat nelayan di daerah penelitian mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut tidak seutuhnya akan meningkatkan produktifitas nelayan. Sebab produktifitas nelayan tidak hanya ditentukan oleh alat-alat yang mereka gunakan, namun mereka menyebutkan bahwa produktifitas mereka sangat ditentukan oleh keadaan iklim. Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa walaupun ada bantuan kapal, mesin kapal maupun jaring jika iklim tidak mendukung "cuaca buruk" maka hal itu akan percuma, hasil tangkapan tidak akan meningkat.

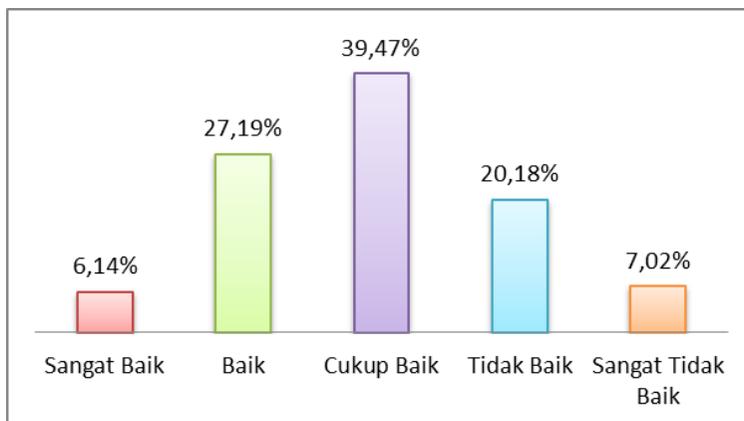
Ada beberapa nelayan yang merasa bahwa selama ini bantuan alat-alat yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran. Nelayan berharap, pemerintah dapat turun langsung kedalam lingkungan masyarakat nelayan agar dapat melihat karakteristik nelayan secara utuh, sehingga kebijakan yang dilakukan tidak hanya terbuang sia-sia. Sebab selama ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan karakteristik mereka sehingga nelayan lebih memilih menjual alat-alat yang diberikan karena tidak dapat digunakan oleh nelayan. Hal tersebut sangat disayangkan sebab tujuan utama diadakannya kebijakan tersebut pastinya untuk

membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan peralatan penangkapan ikan sehingga produktifitas nelayan akan meningkat.

### ***Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pemberian Bantuan Prasarana Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan***

Selain kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan prasarana pengolahan hasil tangkapan ikan, pemerintah juga meberikan kebijakan untuk pelaku industri pegolahan hasil tangkapan ikan dalam bentuk perlatan. Peralatan-peralatan teresbut diantaranya adalah bantuan alat-alat pengasinan ikan, alat agkut hasil pengolahan ikan, sarana penjemuran ikan dan alat pengemasan hasil perikanan.

Rata-rata persepsi masyarakat nelayan maupun pelaku industri perikanan tentang adanya kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Sumber: Data primer diolah, 2017

**Gambar 2.**

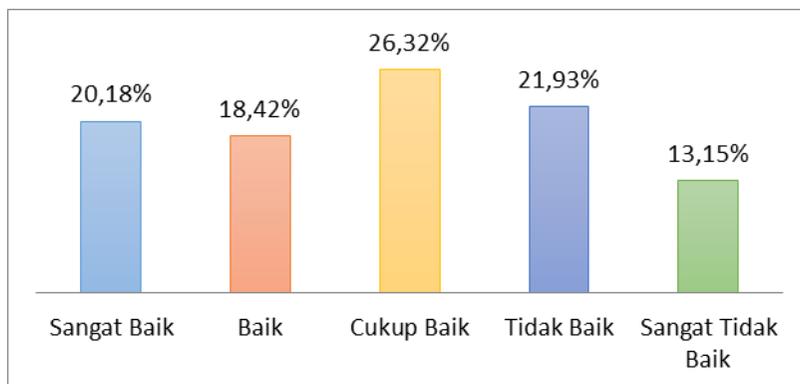
### **Rata-rata persentasi persepsi masyarakat nelayan terhadap pemberian bantuan alat alat pengolahan**

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa sebesar 27.19% masyarakat nelayan berpersepsi baik dan 39.47% cukup baik dengan adanya kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan seperti alat-alat pengasinan ikan, penjemuran ikan, alat angkut hasil pengolahan serta alat pengemasan. Mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan produktifitas dan penghasilan yang mereka peroleh. Mereka berpendapat bahwa jika memperoleh bantuan peralatan pengolahan maka biaya yang akan dikeluarkan akan semakin kecil. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang berpersepsi tidak baik yaitu 20.18% mengatakan jika kebijakan tersebut dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan mereka. Mereka beranggapan bahwa produktifitas industri pengolahan ikan sangat tergantung dengan jumlah pasokan ikan dan tenaga kerja yang tersedia. Jika ketersediaan ikan tidak banyak maka produktifitas

pengolahan hasil perikanan akan menurun. Sebab bahan baku sangat tergantung dengan hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan. Begitu juga dengan tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dalam melakukan pengolahan maka produktifitas pengolahan akan meningkat pula.

### ***Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Kebijakan Pelatihan pengolahan dan Pemasahan Hasi Tangkapan ikan.***

Selain kebijakan dalam bentuk fisik, pemerintah juga memberikan kebijakan yang berguna untuk mengembangkan sumber daya manusianya yaitu masyarakat nelayan dan pelaku industri pengolahan ikan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebab, dalam melakukan suatu usaha diperlukan sumberdaya yang baik agar usaha yang dijalankan juga dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Berikut adalah rata-rata persentase persepsi masyarakat nelayan maupun pelaku industri pengolahan ikan terhadap kebijakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.



Sumber: Data primer diolah, 2017

**Gambar 3.**

### **Rata-rata persentase persepsi masyarakat nelayan terhadap kebijakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.**

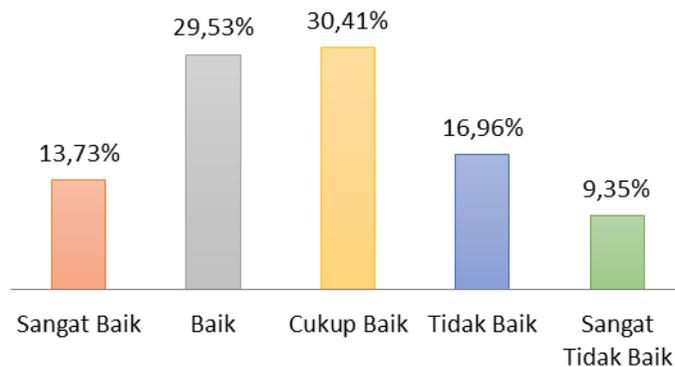
Berdasarkan gambar 3, maka dapat diketahui bahwa masyarakat di daerah penelitian yaitu sebesar 20.18% berpersepsi sangat baik bahwa kebijakan dalam bentuk pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan mereka. Mereka mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat memiliki keterampilan yang baik terutama dalam poses pengolahan ikan, dengan meningkatnya kemampuan yang dimiliki, mereka dapat meningkatkan kualitas usaha mereka serta dapat membuka peluang usaha baru sehingga produktifitas dan pendapatan mereka akan bertambah. Sedangkan 26.32% masyarakat berpersepsi cukup baik terhadap kebijakan tersebut.

Meskipun sebagian besar masyarakat berpersepsi cukup baik, namun masih ada masyarakat yang mengatakan tidak baik yaitu sebesar 21.93%

bahkan 13.15% masyarakat mengatakan sangat tidak baik. Sebagian besar mereka yang mengatakan tidak baik dikarena mereka menganggap kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara tidak berkelanjutan. Tidak ada tindakan lanjut yang dilakukan setelah adanya kegiatan tersebut. Masyarakat berharap bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti sebatas pelatihan saja, sehingga manfaat dari diadakannya pelatihan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

### *Persepsi Masyarakat Terhadap Keseluruhan Kebijakan*

Setelah menganalisis untuk setiap kebijakan yang telah diberikan yaitu kebijakan dalam pemberian bantuan alat penangkapan ikan, pemberian alat pengolahan hasil tangkapan ikan serta kebijakan dalam pemberian pelatihan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusiannya. Maka secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



*Sumber: Data primer diolah, 2017*

**Gambar 4.**

### **Rata-rata persentase persepsi masyarakat terhadap kebijakan**

Berdasarkan gambar 4, diatas maka dapat diketahui bahwa presentase tertinggi terdapat pada masyarakat yang berpersepsi cukup baik terhadap kebijakan yang telah diberikan yaitu sebesar 30.41% tidak jauh berbeda dengan jumlah nelayan yang berpersepsi baik terhadap kebijakan yang ada dengan presentase 29.73%. Penelitian serupa dilakukan oleh Muclisin, dkk (2012), yang dilakukan di daerah Aceh Besar, dimana penelitian tersebut mengatakan bahwa sebagian besar nelayan pernah mendapatkan bantuan dari berbagai sumber. Lembaga yang paling banyak atau sering memberikan bantuan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar. Jenis bantuan yang umum yang diterima adalah dalam bentuk barang antara lain kapal, alat tangkap dan mesin kapal. Mayoritas nelayan menyatakan jenis bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagian masyarakat nelayan menyatakan bahwa kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Hal ini sedikit berbeda dengan dengan hasil penelitian ini yang dilakukan di Kota Bengkulu, dimana masyarakat nelayan berpersepsi bahwa bantuan yang umum diterima dalam bentuk peralatan seperti kapal, mesin dan alat penangkapan ikan berjalan berjalan cukup baik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat tidak sepenuhnya beranggapan baik terhadap kebijakan yang ada. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor untuk masing-masing kebijakan, masyarakat menilai meskipun kebijakan yang diberikan mampu meningkatkan kinerja mereka namun, secara implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Mereka menilai masih banyak terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut kepada nelayan yang dapat dilihat dari ketidak efisienan pendistribusian kebijakan yang ada hingga ketidak tepatan jenis kebijakan yang dikeluarkan untuk nelayan. Masyarakat nelayan berharap dalam pendistribusian ataupun menentukan jenis kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya pemberi kebijakan yaitu pemerintah harus lebih aktif dan melibatkan diri secara langsung sehingga diperoleh gambaran nelayan secara utuh, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kebijakan seperti apa yang sesuai dengan keadaan nelayan didaerah yang akan akan diberikan kebijakan demikian juga dengan sisitem pendistribusiannya yang selama ini dinilai nelayan tidak efisien.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Persepsi masyarakat nelayan bisa dikatakan cukup baik terhadap kebijakan di bidang perikanan yang diberikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan alat dalam bentuk fisik maupun kebijakan dalam pemberian pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

### **Saran**

Pemberian kebijakan di bidang perikanan dalam bentuk apapun seharusnya memang berdampak positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidak sepenuhnya terwujud, bukan karena ketidak mampuan kebijakan tersebut membenahi kinerja masyarakat nelayan namun ketidak berhasilan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut dilapangan, sehingga banyak masyarakat nelayan yang merasa pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal. Diharapkan perbaikan tatacara pengimplementasian kebijakan dilapangan sehingga manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan.

## Ucapan Terimakasih

Penulisan jurnal ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dalam program Indofood Riset Nugraha 2016/2017 yang telah memberikan hibah dana penelitian untuk mendukung jalannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016. *Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dan UMKM Berbasis Kewirausahaan*: Jakarta
- Lestari dan Wirjodirjo, 2010. *Analisis Kesejahteraan Pelaku Industri Pengolahan Ikan Pada Komunitas Klaster Masyarakat Pesisir*. Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
- Nasarudin, 2013. *Analisis Kelayakan Ekonomi Dan Keuangan Usaha Ikan Lele Asap Di Pekanbaru*. Universitas Padjajaran. *Jurnal Ekonomi*. 12(2):.
- Risnita, 2012. *Pengembangan Skala Model Likert*. Edu-Bio; Vol.3 2012.
- Riskawati, 2013. *Uji Validitas dan Reliabilitas*. Statistika Pendidikan, Jakarta.
- Satria, 2012. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan*. Badan Pembinaan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Muchlisin, Zainal A., Nur Fadli, Arifsyah M. Nasution dan Rika Astusi. 2012. *Persepsi Nelayan Terhadap Kebijakan Subsidi Perikanan Konservasi Aceh Besar , Provinsi Aceh*. Jurusan Budidaya Perairan, Koordinator Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111. *Depik*, 2(1):33-39
- Tohir, 1993. *Seuntai Pengetahuan Tentang Usahatani Indonesia*. Gramedia: Jakarta